



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

Jl. Soekarno Hatta No. 705 Telepon (022) 7320913, 7302775 Fax. (022) 7331978

Website : www.diskuk.jabarprov.go.id – email : diskumkm@jabarprov.go.id

BANDUNG – 40286

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

NO : 288/ KOM.0301.10/ SEKRE

TENTANG **PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT** **DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL** **PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026**

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL **PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;



A72A186F38

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A72A186F38>

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);
10. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09/OT.03/ORG Tanggal 14 Januari 2022 tentang Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi dalam pelaksanaan survei;
 - c. Menetapkan teknis survei; dan



A72A186F38

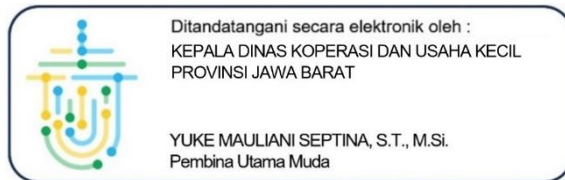
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A72A186F38>

d. Melaporkan hasil pelaksanaan survei.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat



A72A186F38

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A72A186F38>

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Provinsi Jawa Barat
Nomor : 288 / KOM.0303.10/ SEKRE
Tanggal : 19 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN/ BIDANG	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Yuke Mauliani Septina, M.Si.,	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	Ketua
2.	Dr. Tatang Suryana, S.Si., M.Si.,	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
3.	Sutiyah, S.I.P., M.M.,	Kepala Subbag Tata Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	Anggota
4.	Akeu Taofik Arifin, S.T., M.M.,	Kepala Subbag Tata Usaha Unit Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	Anggota
5.	Yusuf Effendy, S.E., M.M.,	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Anggota
6.	Neni Agustiani, S.E., M.M.,	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Anggota
7.	Shanty Arisfianty Devi, S.MB.,	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Anggota
8.	Ivon Dwi Apriyanti, S.Pd., M.M.,	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Anggota
9.	Nurwanto Ambari, S.Ikom.,	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
10.	M. Zain Nauval. A.md.,	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Anggota
11.	Resta Agus Saputri, A.Md.A.B.,	Arsiparis terampil	Anggota
12.	Muhammad Jirjies “Alam, S.E.,	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Anggota
13.	Fahmi Mubarak, S.Ak.,	Penata Layanan Operasional	Anggota
14.	Raka Rahadian, S.Ikom., M.M.,	Penata Layanan Operasional	Anggota
15.	Ade Dian Islamina, S. Sos.,	Penata Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

YUKE MAULIANI SEPTINA, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A72A186F38>